

**CITRA PENGUASA IDEAL DALAM PERSPEKTIF
POLITIK IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA
BAGI KEPEMIMPINAN DI INDONESIA**

Oleh:
Mukhamad Murdiono
Staf Pengajar FISE UNY

Abstract

This research aims at describing political thought of Ibnu Khaldun on ideal leader and its relevance to leadership in Indonesia. Through critical analysis, this research explores the formulation of types of ideal leader in Ibnu Khaldun's thought.

This is a descriptive qualitative research. The technique of data collection is documentation. The data analysis is conducted through deductive analytic technique. Inference technique through internal and external criticism is used to gain the credibility.

The result of the research shows that the image of ideal leader in Khaldun's thought is like the leader described in letter of Thahir bin Husin addressed to his son, Abdullah bin Thahir after he was noted as a governor. The description consists of: a leader must be aware that God keep watching him, government must be smoothly but firmly carried out with justice, an ideal leader must concern on five day prayers as they are manifestation of life and view of life, a leader should treat his job as God's mandate, always obey Him, spend all expenses for the sake of the people's wealth, work hard and the result is used for the people, informative and good networking, easy to meet by people, and the primary concern of a leader must be on the people. This description is still relevant to consider in selecting Indonesia leaders.

Keywords: leader, Khaldun, leadership

PENDAHULUAN

Negara dan kekuasaan adalah dua hal yang tidak dapat untuk dipisahkan. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Keberadaan seorang penguasa atau kemudian lazim disebut sebagai pemimpin

dalam sebuah negara adalah sebagian dari *sunatullah*. Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) secara alamiah mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok, satu dengan yang lain saling memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan. Dalam kehidupan kelompok, manusia akan membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengatur kehidupan manusia dalam kelompok tersebut (negara). Sehingga kepentingan masing-masing individu (warga negara) dapat terartikulasikan. Terjadinya krisis kepemimpinan yang dialami Indonesia terjadi oleh karena adanya kecenderungan menipisnya kepedulian para penguasa negara terhadap kepentingan publik.

Keberadaan seorang penguasa akan sangat menentukan keberadaan sebuah negara. Baik dan buruknya negara ditentukan oleh perhatian dan kepentingan yang diberikan oleh penguasanya. Apabila penguasa mementingkan kepentingan rakyat, maka negaranya akan menjadi baik. Sedangkan apabila penguasa mementingkan kepentingan pribadi mereka negara itu akan menjadi negara yang terpuruk atau bahkan menjadi negara yang hancur.

Dalam kenyataannya, keberadaan seorang penguasa dalam sebuah negara cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara kepentingan rakyat jauh ditinggalkan dan terabaikan. Bahkan tidak jarang di dunia ini yang menggunakan kekuasaannya hanya untuk memperkaya diri dan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya, seperti apa yang pernah diteoretisasikan oleh Machiavelli. Sehingga tepat kiranya kalau Lord Acton (mantan presiden Amerika Serikat) menyatakan bahwa *power tends to corrupts but absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung untuk korup, tapi kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula).

Kehadiran seorang penguasa ideal dalam sebuah negara memang menjadi harapan dari setiap rakyat. Setidaknya seorang penguasa harus mempunyai kharisma di hadapan rakyatnya. Istilah kharisma ini dikemukakan oleh Max Weber dengan mengambil perbendaharaan kata pada permulaan pengembangan agama

Kristen guna menunjuk satu dari tiga jenis kekuasaan (*authority*) yang kini merupakan klasifikasi klasik mengenai kekuasaan atas dasar tuntutan keabsahan (Kartodirdjo, 1984:166).

Makna dan hakikat pemimpin kharismatik akhir-akhir ini semakin meluas dan hampir merosot artinya. Kini hampir setiap pemimpin yang memiliki daya tarik yang disukai dan menonjol terutama dari negara-negara baru (berkembang), tanpa pandang bulu diberikan julukan kharismatik. Dengan tiadanya ciri-ciri yang jelas mengenai sifat-sifat kepribadian atau kelakuan seorang pemimpin yang kharismatik maka pengertian tentang pemimpin kharismatik kini semakin kabur maknanya.

Seorang penguasa ideal tidak hanya memiliki kharisma di hadapan rakyatnya tetapi juga mempunyai kriteria-kriteria lain yang dapat mengantarkannya untuk dapat dicitrakan sebagai penguasa ideal. Ilmuwan yang mencoba membahas secara lebih detail tentang permasalahan kekuasaan ini salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Melalui karya besarnya yang kemudian sangat terkenal yaitu "*muqaddimah*" ia mengemukakan pemikirannya tentang citra penguasa ideal.

Kehidupan politik dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam pemikiran Ibnu Khaldun adalah suatu keharusan dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Tanpa kehidupan politik, kehidupan manusia dalam masyarakat tidak akan teratur. Tolong-menolong untuk kepentingan mencapai tujuan bersama tidak akan dapat direalisasikan. Karena itu, politik adalah sebuah mekanisme yang menjadikan kehidupan manusia dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang citra penguasa ideal, dapat diadopsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Krisis kepemimpinan yang menimpa Indonesia barangkali telah menjauh dari kriteria-kriteria penguasa ideal yang dicitrakan oleh Ibnu Khaldun. Hanya saja penguasa yang bagaimana menurut Ibnu Khaldun dapat dicitrakan sebagai penguasa ideal. Dengan harapan

besar bahwa terpilihnya seorang penguasa di Indonesia sesuai dengan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun akan membawa Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran politik Ibnu Khaldun mengenai citra penguasa ideal dan relevansinya bagi kepemimpinan di Indonesia. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin bangsanya. Dengan mengetahui pemikiran tentang penguasa ideal seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun diharapkan masyarakat dapat menentukan pilihan terhadap pemimpin yang mempunyai citra seperti yang dicitrakan oleh Ibnu Khaldun.

Cara Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Penganalisis dalam hal ini tidak hanya tertarik pada pesan itu sendiri, tetapi pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas tentang proses dan dampak komunikasi. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan utama dari analisis konten adalah membuat inferensi. Penelitian ini akan mencoba menganalisis bagaimana pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang citra penguasa ideal dan relevansinya bagi kepemimpinan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang berbentuk buku, artikel, jurnal, majalah, atau tulisan-tulisan di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang berkaitan erat dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang citra penguasa ideal dan relevansinya bagi kepemimpinan di Indonesia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mempergunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa kategorisasi maupun proposisi (Bungin, 2001:20). Adapun langkah-langkah untuk

menganalisis data dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Waliudin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid bin Utsman (lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun), lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 723 Hijriyah bertepatan dengan 27 Mei 1406 Masehi dan wafat di Cairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 Hijriyah bertepatan dengan 19 Maret 1406 Masehi. Dari silsilahnya, keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut (Yaman Selatan). Dari garis keturunan - kecuali ayahnya yang lebih intensif di bidang pendidikan - keluarganya dari pihak ayah merupakan ahli di bidang politik. Dari Hadramaut, keluarga Ibnu Khaldun pindah ke Andalusia dan kemudian ke Tunisia pada pertengahan abad VII Hijriyah.

Ibnu Khaldun pertama kali memperoleh pendidikan dari ayahnya. Sejak kecil ia telah mempelajari tajwid dan Al-Qur'an, bahkan menghafalnya. Ia fasih dalam *qira'atal-sab'ah*. Di samping itu, dalam usia dini ia telah mempelajari tafsir, hadits, fiqh (Maliki), gramatika bahasa arab, ilmu mantiq, dan filsafat dengan sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Dengan bekal pendidikan yang demikian luas dan intensif, telah ikut membentuk kepribadian dan keluasan wawasan Ibnu Khaldun. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika dalam usia relatif muda ia telah mampu menguasai berbagai disiplin ilmu.

Berkat pengalaman keluarga dan kemampuan komunikasinya dengan para ulama dan tokoh-tokoh terkenal telah banyak memberikan andil dalam karir politik Ibnu Khaldun. Bahkan dalam waktu relatif singkat, ia mampu menduduki beberapa jabatan penting pada pemerintahan waktu itu. Hal ini dapat dilihat, bahwa pada usia 21 tahun (753 Hijriyah), ia diangkat sebagai sekretaris sultan Al-Fadhl dari dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia.

Dalam karir politiknya, tidak kurang 10 kali ia berpindah jabatan dari satu dinasti ke dinasti lainnya. Sikapnya yang tegas dan komitmen agama yang demikian tinggi membuat Ibnu Khaldun seringkali melakukan “pergeseran loyalitas politis”.

Dalam mereaktualisasikan ide-ide politik idealnya, ia seringkali mendapatkan hambatan dari penguasa waktu itu. Kondisi yang tidak kondusif ini merupakan alasan Ibnu Khaldun melakukan “lompatan politik” bagi upaya menanamkan ide-ide politiknya. Namun demikian, sikapnya yang seperti ini menyebabkan ruang gerak politiknya lama kelamaan semakin sempit dan seringkali dicurigai. Titik klimaks kecurigaan tersebut telah menyebabkan ditangkap dan dipenjarakan selama 21 bulan pada masa pemerintahan Sultan Abu ‘Inan dari Bani Marin. Setelah ia bebas, karir politiknya tidak pernah padam. Gerak atmosfer politiknya bukan hanya antar dinasti, akan tetapi antar negara. Di antaranya untuk beberapa waktu lamanya, ia pernah memainkan politik praktis di Andalusia atas permintaan perdana menteri Ibnu Khatib dan Sultan Mohammad (Nizar, 2003: 97).

Karya terbesar Ibnu Khaldun yang sangat terkenal adalah bukunya yang berjudul *muqaddimah*. Buku *muqaddimah* adalah sebuah buku yang berdiri sendiri, meskipun pada mulanya merupakan bagian dari sebuah karya yang lebih besar, yaitu *al-‘ibar* (suri tauladan) yang terdiri dari tiga jilid. Pendahuluan dan jilid pertama dari buku *al-‘ibar* itulah yang menjadi buku *muqaddimah* yang kita kenal sekarang ini. Sedangkan jilid kedua khusus tentang sejarah bangsa Arab serta bangsa-bangsa lain yang semasa dengannya. Jilid ketiga yang merupakan jilid terakhir khusus membicarakan bangsa Berber yang tinggal di Afrika Utara (Zainuddin, 1992: 52).

Muqaddimah Ibnu Khaldun adalah sebuah buku yang memperhatikan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta aspek-aspek yang ditimbulkan oleh kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu di bidang budaya, kuasa, negara, pembangunan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Isi dari

buku tersebut sangat bervariasi sekali sehingga dapat dikatakan bahwa buku itu bersifat ensiklopedis. Di dalamnya terdapat berbagai macam pokok permasalahan; seperti pengaruh lapar terhadap kesehatan tubuh, masalah-masalah yang berkenaan dengan sihir dan tenung, matematika dan ilmu tafsir, serta masalah ramalan tentang jatuh banggunya kekuasaan dan pemerintahan.

Pada umumnya dapat dikemukakan bahwa kandungan buku itu serta teori-teori yang terdapat di dalamnya, dengan mengecualikan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah pasti belum mungkin dicapai di zamannya, terutama sekali yang berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial, banyak yang masih tetap menimbulkan kekaguman di kalangan para sarjana sekarang ini. Karena nilai dan kebenaran yang terdapat di dalamnya masih tetap dianggap aktual, bahkan sampai saat ini. Malah di antara pendapatnya itu ada yang demikian modern sifatnya sehingga dalam perkembangan kontemporer, baru diketemukan dalam waktu relatif belakangan ini saja.

Barangkali karena hal-hal seperti inilah Toynbee (Sejarahwan) memberikan penilaian yang demikian tinggi kepada Ibnu Khaldun dan buku *muqaddimah*nya. Bahkan ia membandingkan karya Ibnu Khaldun dengan karya Thucydides dan Machiavelli. Ibnu Khaldun menurutnya bak bintang yang bersinar amat cemerlang karena menyinari alam yang gelap gulita. Sementara Thucydides dan Machiavelli bak bintang cemerlang yang hidup dalam masa dan tempat yang cemerlang pula. Ibnu Khaldun menurutnya hanya satu-satunya titik cahaya yang bersinar pada waktu itu. Ia betul-betul seorang pribadi yang luar biasa dalam sejarah peradaban, yang hidupnya sendiri dalam keseluruhannya adalah sepi, miskin, kotor, kejam, dan pendek (Toynbee dalam Issawi, 1962: XXIV).

Dalam buku *muqaddimah* Ibnu Khaldun memaparkan tentang citra penguasa ideal. Menurutnya penguasa ideal adalah penguasa yang kira-kira dapat mendekati citra penguasa seperti yang digambarkan dalam surat Thahir bin Husin. Surat itu dituju-

kan kepada anaknya Abdullah bin Thahir yang baru saja diangkat menjadi gubernur yang wilayah kekuasaannya meliputi Mesir dan Raqqah serta daerah sekitarnya. Ibnu Khaldun mendapati bahwa petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat yang terkandung di dalamnya sudah mencakup segala yang diperlukan bagi negara dan pemerintahannya, baik yang berkenaan dengan tata cara keagamaan dan kekuasaan, serta mendorongnya untuk berpegang kepada budi pekerti yang mulia dan sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki baik oleh kalangan penguasa maupun oleh orang biasa.

Dari surat Thahir bin Husin itu jelas sekali bahwa agama memegang peranan yang amat besar dalam pelaksanaan kekuasaan yang baik. Seorang penguasa harus selalu insaf dan sadar bahwa Tuhan selalu mengawasinya. Karena itu, ia harus berusaha sedapat mungkin untuk menjauhkan diri dari kemarahan-Nya. Jelas pula bahwa berkuasa itu adalah salah satu beban yang pertanggungjawabannya harus diberikan kepada Tuhan. Karena itu pelaksanaan kekuasaan haruslah dalam bentuk yang dapat melepaskan si penguasa itu nanti dari api neraka dan siksa-Nya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa moralitas dan agama merupakan inti dari pelaksanaan kekuasaan.

Menurut Ibnu Khaldun pelaksanaan kekuasaan secara lemah lembut adalah pelaksanaan kekuasaan yang terbaik. Kelemahlembutan itu harus pula disertai dengan ketegasan dalam menegakkan keadilan, serta berusaha untuk menciptakan situasi yang aman dan tenteram sehingga rakyat dapat hidup dengan damai. Banyak hal yang harus diperhatikan penguasa untuk kepentingan rakyatnya. Di antaranya adalah upaya agar keluarga dan rumah tangga mereka dalam keadaan damai dan tenteram, darah jangan tertumpah, dan juga mengupayakan agar terjaga keamanan jalan-jalan sehingga tertanam rasa tenteram dalam diri mereka. Tugas pokok ini harus menjadi perhatian utama seorang penguasa.

Ibadah sholat (berjamaah) menurut Ibnu Khaldun merupakan perbuatan pertama yang harus diperhatikan seorang penguasa, karena dengan sholat bersama-sama dengan rakyat, ia telah me-

laksanakan kepemimpinan dalam bentuknya yang tertinggi. Dalam hal ini patut diingat kembali bahwa salah satu alasan yang dikemukakan para sahabat kenapa Abu Bakar memang pantas diangkat menjadi Khalifah setelah nabi Muhammad s.a.w. adalah karena ketika nabi sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai imam sholat, Abu Bakar adalah orang yang dipercayai untuk menjadi imam sholat.

Sholat bukanlah hanya suatu ibadah yang menyangkut hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat merupakan manifestasi dari kehidupan dan pandangan terhadap hidup. Sholat melarang orang melakukan perbuatan keji dan tercela (Al-qur'an, 29:45). Sholat yang baik akan menanamkan dalam diri orang yang melakukannya suatu sifat yang baik dan suatu pandangan hidup yang baik pula. Karena itulah dalam surat itu disebutkan:

Hendaklah tugas pertama yang harus engkau lakukan bagi dirimu dan harus engkau kerjakan adalah selalu melaksanakan sholat lima waktu yang telah diwajibkan Allah atasmu dengan berjama'ah bersama-sama dengan orang-orang yang datang kepadamu. Laksanakanlah sholat itu lengkap dengan segala sunnahnya, seperti menyempurnakan wudhu' sebelum sholat itu. Mulailah sholat itu dengan mengingat Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Hiasilah bacaanmu dengan suara yang merdu. Mantapkanlah ruku' dan sujudmu, demikian pula tasyahhudmu. Bulatkanlah perhatian dan niatmu, doronglah untuk sholat berjama'ah orang-orang yang berada di sekitarmu dan bawahan-bawahanmu (Khaldun, 1986: 141).

Jadi sholat itu, selain ibadah kepada Allah juga merupakan pelurusan pandangan hidup, melatih diri untuk melakukan segala sesuatu dengan cermat dan teliti, suatu upaya sosial yang menekankan disiplin dan kepatuhan kepada pimpinan dan juga merupakan manifestasi dari kepemimpinan itu sendiri. Barangkali inilah sebabnya kenapa pangkat khilafah itu dinamakan pula imamah, yang pada dasarnya berasal dari posisi imam dalam sholat. Ingatan kepada Tuhan, terutama sekali dalam mengambil keputusan ke-

negara yang penting adalah suatu anjuran penting yang terdapat dalam surat itu. Dengan demikian, setiap putusan yang diambil terjauh dari hawa nafsu dan bersumber dari suatu titik tolak yang bersih dan murni.

Dalam bidang ekonomi dikemukakan agar segala sesuatu harta benda yang dikuasai digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, karena harta yang dimiliki seorang manusia bukanlah harta yang ditimbun-timbunnya, akan tetapi harta yang telah diberikannya kepada orang lain dengan maksud kebaikan. Seorang penguasa dianjurkan untuk bekerja keras siang dan malam melaksanakan amanah yang telah dipikulkan Tuhan di pundaknya. Kalau dalam waktu sekarang ini dapat dicontohkan bahwa seorang penguasa itu bertugas tidak terikat jam kantor, akan tetapi bertugas terus menerus tanpa dibatasi oleh jam-jam tertentu.

Seorang penguasa yang baik adalah seorang penguasa yang tidak mau mengganggu harta benda rakyatnya, dan mau memberikan bantuan kepada golongan rakyat yang tidak mampu. Uang yang dikumpulkan dari pajak harus digunakan untuk kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan jasmani maupun rohani mereka. Untuk itu maka penguasa harus pandai-pandai dalam memilih orang-orang yang akan didekatinya, dan orang-orang yang akan diangkatnya sebagai pembantu. Perhatian utama penguasa harus ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Keadaan makanan, kesehatan, pendapatan, dan seluruh aspek kesejahteraan rakyat harus memperoleh perhatian yang terus menerus dari pihak penguasa.

Penguasa ideal harus juga memiliki jaringan informasi yang lengkap sehingga ia dapat mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan rakyatnya, dan bagaimana cara para pembantunya melaksanakan tugas, terutama para pembantunya yang bertugas jauh dari pusat. Untuk itulah diperlukan orang-orang yang berfungsi sebagai mata dan telinga penguasa, sehingga penguasa itu benar-benar tahu apa yang terjadi di daerah kekuasaannya dan apa yang terjadi pada rakyatnya. Penguasa hendaknya adalah seorang yang

terbuka dan gampang ditemui rakyat untuk menyampaikan keluhan yang mereka miliki. Orang-orang yang berada di sekeliling penguasa harus mendapat perhatian yang cermat, sehingga masing-masing pembantunya mendapat waktu tertentu untuk berjumpa dan bermusyawarah dengannya.

Konsep mengenai citra penguasa ideal dari Ibnu Khaldun seperti yang telah dikemukakan di muka, dapat untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih figur kepemimpinan di Indonesia. Meskipun ia seorang tokoh yang hidup jauh beberapa abad yang lalu sebelum lahirnya negara Indonesia, namun menurut peneliti pemikiran politiknya masih cukup relevan untuk diterapkan di era modern seperti saat sekarang ini dengan sedikit melakukan adaptasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang mampu melintasi dimensi waktu. Pemikiran-pemikirannya tidak hanya berlaku untuk masanya saat itu, tapi juga masih relevan untuk didiskusikan saat ini. Tentunya pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun yang ditransformasikan ke dalam era pemikiran alam modern harus ditempatkan secara proporsional dan profesional.

Apabila kita mencermati keadaan negara ini, banyak ditemui kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik. Penyimpangan itu tidak hanya terjadi di lingkungan eksekutif saja, tetapi juga telah merata ke lingkungan legislatif dan yudikatif. Pejabat negara yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat untuk keluar dari krisis nasional, ternyata telah mengingkari nurani kebangsaannya. Kepekaan terhadap pertanggungjawaban publik sudah hilang. Para pejabat tinggi pada instansi-instansi strategis bukannya memberikan keteladanan, melainkan mempertontonkan perilaku tercela dalam mengelola otoritas publik. Kecenderungan ini dapat mengarah kepada makin suburnya budaya kekuasaan, serta mengancam efektifitas kepemimpinan nasional.

Apabila kita mencermati kepemimpinan Indonesia semenjak negara Indonesia berdiri, ternyata memiliki dinamika tersendiri. Kemudian apabila dikaitkan dengan tipe ideal yang di-

formulasikan Ibnu Khaldun, ternyata kepemimpinan di Indonesia telah jauh meninggalkan pola-pola kepemimpinan ideal. Para pemimpin di Indonesia cenderung menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal itu hampir terus berlanjut dari waktu ke waktu. Pergantian kepemimpinan nasional ternyata tidak banyak mengubah pola para pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya.

Dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia, pola ideal seorang pemimpin sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Khaldun hampir tidak pernah kita jumpai. Di masa awal terbentuknya negara Republik Indonesia, penguasa cenderung menggunakan kekuasaannya secara berlebihan. Bahkan untuk melanggengkan kekuasaannya presiden mengangkat dirinya melalui sebuah ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sebagai presiden seumur hidup. Pada masa itu banyak terjadi gejolak dalam masyarakat, sebagai sebuah wujud perlawanan dan ketidaksetujuan mereka dengan cara-cara penggunaan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penguasa yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Pergantian kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto, setidaknya telah membawa perbaikan di bidang ekonomi meskipun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut telah banyak mengorbankan bidang-bidang pemerintahan yang lain. Seperti di bidang politik, tidak menunjukkan perubahan ke arah perbaikan. Bahkan kebebasan dan kemerdekaan warga negara terbelenggu dengan begitu kuatnya. Kekuasaan di tangan besi Soeharto selama kurang lebih 32 tahun akhirnya mengalami keruntuhan pada Mei 1998.

Pergantian kepemimpinan setelah era Soeharto sampai saat ini telah terjadi selama empat kali. Pemimpin yang memimpin Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru memang memiliki tugas yang cukup berat. Di samping harus memperbaiki sistem politik yang dianggap kurang demokratis, ia juga harus membangun kembali berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang

mengalami kemerosotan, terutama sekali bidang ekonomi. Hadirnya seorang penguasa ideal di tengah-tengah rakyat Indonesia memang sesuatu yang sangat dirindukan oleh setiap rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Citra penguasa ideal dalam perspektif politik Ibnu Khaldun adalah orang yang menganggap kekuasaannya itu sebagai amanah Allah, sehingga pelaksanaan kekuasaannya itu dianggapnya tidak lain daripada cara yang terbaik untuk mengabdikan kepada Tuhan. Seorang penguasa ideal akan berusaha untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan-Nya, sehingga prinsipnya adalah memberi contoh atau teladan dengan perbuatannya sendiri. Moralitas dan agama menurut Ibnu Khaldun merupakan inti dari pelaksanaan kekuasaan.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang penguasa ideal tentunya masih relevan untuk diterapkan di Indonesia dengan melakukan sedikit adaptasi. Meskipun konsep tersebut merupakan buah pikiran beberapa abad silam. Bagaimanapun Indonesia masih perlu untuk menerapkan konsep mengenai penguasa ideal dari Ibnu Khaldun. Selama ini penguasa di Indonesia cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya, sementara itu kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan secara serius. Para penguasa di Indonesia tidak mampu memberikan keteladanan, melainkan mempertontonkan perilaku tercela dalam menggunakan kekuasaannya. Dengan mengacu kepada konsep penguasa ideal sebagaimana diformulasikan oleh Ibnu Khaldun diharapkan akan hadir penguasa di Indonesia yang mampu untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai permasalahan-permasalahan bangsa dan negara yang terus datang silih berganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Zainuddin. (1992). *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (1989). *Alqur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Thoha Putera.
- Issawi, Charles. (1962). *Filsafat Islam tentang Sedjarah: Pilihan dari Muqaddimah karangan Ibnu Chaldun dari Tunis (1332-1406)*. Djakarta: Tintamas.
- Khaldun, Ibnu. (1986). *Muqaddimah*. Terjemahan Ahmadin Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Samsul Nizar. (2003). "Konsep negara dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun". *Jurnal Demokrasi: Jurnal Imliah Kenegaraan*. Padang: Pusat Kajian Civic-FIS-UNP.
- Sartono Kartodirdjo. (1984). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3S.